

KABARPKS

Kabarkan Kiprah PKS untuk Indonesia



PKS

*Bersama Melayani
Rakyat*

TERUS MELAYANI DAN MEMBELA RAKYAT



Habib Salim
Ajak Elemen
Bangsa Perbaiki
Demokrasi Indonesia



Presiden PKS
Minta PKS DKI Jakarta
Bersiap Menang Pilgub
DKI

RAKERNAS 2021

Terus Melayani dan Membela Rakyat



Sudah rampung. Seluruh proses pengisian kepengurusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari tingkat pusat sampai tingkat ranting. Ada kabar menggembirakan. Slot kepemimpinan PKS banyak diisi wajah-wajah baru. Beberapa kabar mengonfirmasi keterisian anak muda dan kader perempuan secara signifikan.

Usai pelantikan kepengurusan

secara serentak, kini saatnya bekerja. Bukan asal bekerja. Memulai kerja besar tentu dengan perencanaan. Maka dihelatlah Rapat Kerja Nasional (Rakernas). Durasinya dibuat cukup panjang, 1-18 Maret 2021. Durasi yang agak tak lazim dalam sebuah gelaran Rakernas partai politik.

Tapi memang semuanya baru. PKS ingin memulai tradisi baru. Rakernas bukan simbolik

seremonial. Benar-benar diuji, didebat, diadu argumen-argumen setiap usulan rencana. Sehingga dihasilkan satu program yang tepat guna dalam waktu hingga 2025.

Satu penguatan pesan telah digariskan sebagai panduan Rakernas. Terus Melayani dan Membela Rakyat. Bertautan dengan pesan Bersama Melayani Rakyat yang akan dibawa sebagai roh PKS lima tahun ke depan.

Melayani dan Rakyat adalah pesan kunci. Ada kerja, ada penerima manfaat dari kerja-kerja itu. Ada adagium pemimpin adalah pelayan rakyat. Secara politik, PKS tidak sedang dalam posisi memimpin negeri ini. Tapi tak lantas kerja melayani lalu mandeg.

Longsor Sumedang, Gempa Sulbar, Banjir Kalsel, Banjir Jabodetabek, Banjir Jawa Tengah. Relawan PKS masih bekerja di lokasi. Meski

bencana di Sulbar dan Kalsel tak lagi jadi perbincangan arus utama. Melayani sudah ditetapkan jadi kerja-kerja utama partai. Tak soal apa yang terjadi esok-esok.

Rumah Keluarga Indonesia (RKI) yang diisi perempuan tangguh PKS terus bergerak. Ambulans layanan tak henti beroperasi. Legislator PKS berkeliling menerima aduan-aduan masalah. Dari masalah pribadi sampai persoalan kenegaraan.

Gebrakan Kepemudaan PKS memberikan pendampingan ide-ide besar anak muda negeri ini. Pendampingan bagi UMKM saat ekonomi sedang krisis juga sudah terselenggarakan. Suara untuk petani, nelayan, pekerja dan warga Desa tak luput dari kerja pelayanan. Tentu sebagai kekuatan penyeimbang, PKS akan terus menjadi penyeimbang yang

kritis sekaligus konstruktif. PKS akan menjadi saluran suara-suara yang terabaikan.

Komitmen keumatan dan kebangsaan akan semakin dikuatkan. Partai milik umat bermakna segala kebutuhan umat akan menjadi prioritas. Semangat kebangsaan berarti antusias kolaborasi dengan seluruh elemen untuk kepentingan yang lebih besar, meski ada perbedaan sebagai hukum alam.

Masih banyak rencana-rencana kerja yang bakal diolah dan lantas direalisasikan. Mohon Doa, kerja-kerja untuk rakyat tak harus selalu menunggu jadi penguasa. Mohon dukungan, berbagai program yang akan dikerjakan butuh kolaborasi semua kalangan. PKS membuka tangan karena kami ingin Terus Melayani dan Membela Rakyat.

Selamat Rakernas PKS 2021!

RAKERNAS

16-18 Maret 2021

**Terus Melayani & —
— Membela Rakyat**



Bencana Alam

Menerobos Pakai Motor, Presiden PKS Tinjau Banjir di Bekasi dan Berikan Bantuan

"Ini perlu segera dicarikan solusinya. Jangka pendek dan panjang. Pastikan warga yang terkena banjir dapat pelayanan maksimal. Berikan logistik dan tempat mengungsi yang memadai,"

H. Ahmad Syaikhul

Presiden PKS



Jakarta -- Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas bantuan yang diberikan BI kepada UMKM melalui program Program Sosial Bank Indonesia (PSBI), dalam acara rapat Komisi XI DPR RI bersama Dewan Gubernur Bank Indonesia, pada Senin (25/1/2021).

Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan DPP PKS ini juga memaparkan data dari Kementerian Koperasi yang menyebutkan bahwa rata-rata UMKM di Indonesia yang jumlahnya 64 juta unit UMKM, memiliki masalah dengan kapasitas SDM nya. "Sebenarnya, banyak sekali program-program yang bisa diakses oleh UMKM. Tetapi

karena keterbatasan kapasitas SDM mayoritas pelaku UMKM terutama yang ultra mikro, maka program-program tersebut sulit diakses oleh mereka," kata Anis.

Kemudian data juga menunjukkan bahwa ketika diproses secara digital, UMKM yang masuk proses digital hingga Juni 2020 tercatat

hanya 9,6 juta unit.

Menurut data yang dipaparkan Anis, masalah lain yang dihadapi UMKM terkait dengan kesulitan akses bantuan restrukturisasi kredit. "Banyak sekali UMKM yang unbankable. Mereka tidak bisa mengakses perbankan," ujarnya. Karenanya, Anis menyarankan agar program-program bantuan restrukturisasi, juga dikururkan melalui BPR, BPRS, BMT atau Koperasi, sehingga pengusaha ultra mikro, terutama ibu-ibu rumah tangga bisa mengakses dengan lebih mudah. "Karena banyak sekali yang membutuhkan permodalan untuk UMKM ini," kata Anis.

Doktor Ekonomi Islam ini mengungkapkan bahwa banyak literatur yang menunjukkan bahwa kunci sukses implementasi kebijakan moneter yang efektif, sangat tergantung dari ekspektasi pelaku ekonomi. Tentang apa yang pelaku ekonomi percayai

akan terjadi di masa mendatang dan kepercayaan pelaku ekonomi terhadap Bank Sentral.

Dengan kata lain, kredibilitas Bank Sentral menjadi sangat penting dalam menentukan apakah Bank Sentral dapat menerapkan satu kebijakan moneter secara efektif.

"Apalagi disaat kondisi ekonomi tidak pasti seperti sekarang ini. Kredibilitas menjadi semakin penting, karena berkaitan dengan kepercayaan pelaku pasar terhadap kemampuan Bank Sentral dalam mengendalikan kebijakan moneter," ungkapnya.

Oleh karena itu Anis menyarankan agar Bank Indonesia memiliki parameter untuk menilai persoalan kredibilitas ini, sehingga kebijakan moneter yang dilakukan betul-betul bisa meyakinkan masyarakat bahwa kondisi saat ini bisa diatasi.

**Bencana Alam**

Reses di Dapil, Ahmad Syaikh Salurkan Bantuan Beras untuk Korban Banjir

"Beras ini saya berikan untuk membantu masyarakat yang menjadi korban banjir di Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta. Bantuan beras ini pastinya kurang banyak. Tapi semoga meringankan beban warga yang jadi korban banjir,"

H. Ahmad Syaikh

Presiden PKS

Bencana Alam

Kunjungi Lokasi Banjir, Anis Apresiasi Kerja Aparat Yang Sigap Tangani Banjir

"Saya melihat pihak Camat, Lurah, RW dan RT di wilayah Cipinang Muara ini cukup sigap dan cepat dalam penanganan korban banjir di wilayahnya,"

Anis Byarwati

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan



Jakarta -- Banjir kembali menggenangi beberapa daerah di Jakarta pada Jum'at (19/02/2021). Hal ini

sebagaimana prediksi BMKG sehari sebelumnya yang mengatakan akan terjadinya cuaca ekstrem di Jabodetabek

pada 19-20 Februari dan mengakibatkan banjir di Jakarta. Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis

Byarwati, langsung meninjau lokasi banjir tadi pagi.

Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Jakarta Timur ini menyambangi korban banjir di wilayah Cipinang Bali, tepatnya di Rw.013 Kelurahan Cipinang Muara, Jakarta Timur. Di wilayah ini terdapat 3 Rw yang terdampak banjir dengan ketinggian sampai pinggang orang dewasa (+- 1 meter), yaitu RW.06, RW.07 dan RW.12.

Dalam dialognya bersama masyarakat, Anis menyampaikan rasa empatinya dan secara simbolis memberikan bantuan masker kepada warga setempat. Ia menyatakan dirinya sangat memberikan apresiasi kepada seluruh aparat dan komponen masyarakat yang bahu membahu secara kompak bergerak mengatasi bencana banjir.

"Semoga banjir segera surut, dan warga yang terdampak bisa kembali ke rumahnya masing-masing dalam keadaan sehat," tuturnya menutup dialog dengan warga.

Saat mengunjungi lokasi, beberapa rumah warga di pinggiran Kali Sunter masih nampak terendam air. Nampak

juga para petugas yang tengah melakukan evakuasi korban banjir. Berdasarkan informasi dari aparat setempat, terdapat sekitar 200 KK terdampak banjir pada hari ini.

Selain mengunjungi lokasi pemukiman warga dan posko pengungsian korban banjir, Anis juga mengunjungi Posko Kesehatan yang terletak di Rw.013 Cipinang Muara. Setelah berbincang dengan beberapa petugas dan masyarakat yang berada disana, Anis menilai kerja aparat dalam penanganan banjir ini cukup bagus. "Saya melihat pihak Camat, Lurah, RW dan RT di wilayah Cipinang Muara ini cukup sigap dan cepat dalam penanganan korban banjir di wilayahnya," kata Anis.

Anggota Komisi XI DPR RI ini juga bertemu dengan Wakil Camat Jatinegara beserta jajarannya, Lurah Cipinang Muara, serta ketua RW dan RT setempat yang bersama-sama dengan Anis meninjau lokasi banjir. Anis sendiri didampingi oleh Ketua BPKK DPD PKS Jakarta Timur, jajaran Pengurus DPC PKS Kecamatan Jatinegara serta para kader yang turut serta berjalan ke lokasi bersama Anis.

Bencana Alam

Banjir Besar di Jabodetabek, Perempuan PKS: Bantu Keluarga Tetap Sehat

"BPKK melalui RKI telah mendirikan dapur umum di posko-posko yang didirikan oleh PKS. Bantu keluarga keluarga Korban banjir agar tetap terjaga kesehatannya dari penyakit akibat banjir maupun potensi penularan Covid-19 di lokasi pengungsian,"

Kurniasih Mufidayati

Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK)



Jakarta -- Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) Kurniasih Mufidayati bersama Rumah Keluarga Indonesia (RKI) DKI Jakarta, menyalurkan bantuan logistik, obat-obatan, nutrisi sehat dan kebutuhan ibu dan anak untuk korban banjir di beberapa titik di wilayah Jakarta Selatan dan Timur. Mufida turun bersama dengan BPKK DKI Jakarta dan

pengurus setempat, Ahad (21/2/2021). Mufida dan rombongan turun di titik lokasi banjir, meninjau posko dan memberikan bantuan antara lain di Pondok Pinang, Petogogan, Kebayoran Lama Utara dan Cipinang Jakarta Timur.

Mufida mengatakan, sudah menjadi kewajiban bagi kader PKS untuk terjun membantu

masyarakat yang tengah dilanda kesulitan, termasuk banjir yang melanda Jabodetabek. "Kami ingin memberi pelayanan kepada masyarakat, khususnya keluarga keluarga yang terkena musibah banjir," jelas Mufida.

"BPKK melalui RKI telah mendirikan dapur umum di posko-posko yang didirikan oleh PKS. Kebutuhan makanan siap saji yang sehat, menjadi penting saat kondisi air meluap seperti saat ini. Banyak sebenarnya kader PKS yang juga menjadi korban banjir tetapi tetap aktif di dapur umum untuk melayani masyarakat," papar Mufida.

Anggota Komisi IX DPR dari Dapil DKI Jakarta II ini mengingatkan agar warga

yang mengungsi diperhatikan secara khusus kondisi kesehatan dan tempat pengungsian. Mengingat Jakarta masih dalam situasi pandemi Covid-19, Mufida mengingatkan di tempat-tempat pengungsian dan posko-posko bantuan, agar tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk meminimalisir terjadinya penularan covid-19 yang bisa membuat keluarga semakin menderita.

"Bantu keluarga keluarga Korban banjir agar tetap terjaga kesehatannya dari penyakit akibat banjir maupun potensi penularan Covid-19 di lokasi pengungsian. Pastikan di lokasi pengungsian utama terdapat fasilitas kesehatan dan tempat beristirahat warga dengan tetap menjaga potokol kesehatan, tidak hanya ketersediaan makanan," ujarnya.

Dirinya berharap banjir bisa segera surut dan petugas bersama-sama warga bisa membersihkan rumahnya

sehingga dapat kembali ke rumahnya dan tidak terlalu lama di pengungsian.

Mufida juga meminta, jika perlu disediakan tempat khusus isolasi Covid-19 bagi warga yang kebanjiran dan sedang menjalani isolasi mandiri. Selain itu, perlu juga dilakukan monitoring ketat terhadap kesehatan masyarakat yang mengungsi, dengan lakukan screening gejala Covid 19.

Untuk banjir kali ini, dirinya meminta Dinas Kesehatan maupun Kementerian Kesehatan memberikan perhatian lebih besar terhadap aspek kesehatan pengungsi ini.

"Jangan sampai tempat pengungsian menjadi tempat munculnya klaster baru penularan Covid-19. Bisa menerapkan tempat pengungsian yang dilengkapi fasilitas kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan seperti di GOR Otista," ungkap Mufida.

Bencana Alam

Habib Aboe: Semangat Persatuan Tulang Punggung Bangsa Hadapi Bencana

Salah satu nilai penting dari empat pilar berbangsa dan bernegara adalah semangat persatuan, semangat ini sangat penting ketika Indonesia menghadapi banyak bencana.

"Saat ini kita sedang diuji, tentu kita perlu mengkoreksi diri atas semua bencana tersebut. Oleh karena itu, PKS melakukan program potong gaji seluruh anggota DPR-nya baik dari pusat maupun daerah. Polda Kalsel menurunkan lebih dari tiga ribu personel untuk membantu banjir. Banyak relawan dari luar daerah seperti Kalteng dan Jawa yang turut membantu penanganan banjir Kalsel. Jangan sampai semangat persatuan ini luntur karena tergeser modernitas, akibatnya kita saling acuh dengan sesama anak bangsa yang tengah terkena musibah. Hal ini tentunya sangat tidak baik untuk bangsa Indonesia kedepan,"

Habib Aboe Bakar Alhabsyi, S.E

Sekretaris Jenderal PKS

Disampaikan dalam sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Banjarmasin Kalimantan Selatan, Minggu (7/2).



Bencana Alam

Tinjau Posko Bencana di Banjarbaru, Netty Aher Minta Pemerintah Perhatikan Kebutuhan Pengungsi



Banjarbaru (19/1) - Hari kedua peninjauan banjir di Kalimantan Selatan, Ketua Bidang Kesejahteraan Sosial DPP PKS Netty Prasetiyani dan Wakil Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Heryawan bergerak menuju kota Banjarbaru ditemani Ketua DPW PKS Kalsel dan Ketua DPD PKS Kota Banjarbaru beserta jajaran

pengurus dan relawan.

Diketahui, sejumlah titik di 11 kelurahan di Banjarbaru terdampak banjir. Dalam kunjungan ke Posko Transad, Guntung Manggis, Netty meminta Walikota Banjarbaru Darmawan Jaya agar memperhatikan kebutuhan para pengungsi.

"Tolong Bapak Walikota memperhatikan kebutuhan pengungsi. Jangan sampai dalam situasi bencana ini, ada masyarakat yang hak dasarnya terlupakan oleh negara," ungkap Netty.

Netty, selaku ketua Task Force Penanggulangan Bencana DPP PKS, juga berpesan kepada aleg

dan jajaran pengurus DPD PKS Kota Banjarbaru agar berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan lembaga lain dalam memberikan pelayanan dan penanganan bencana.

Dalam kesempatan tersebut, Darmawan Jaya menyampaikan bahwa kader PKS turun langsung ke masyarakat bersama unsur pemerintah dan satgas.

"Kader PKS membantu melakukan pendataan masyarakat terdampak dan mendistribusikan bantuan. Kebutuhan warga yang mendesak adalah gas LPG 3 kg dan obat-obatan, terutama obat kulit," ujarnya.

Mendengar aspirasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah dan masyarakat, Netty berjanji akan menindaklanjuti dengan berkomunikasi pada lembaga terkait di pusat seperti BNPB dan Kementerian

Kesehatan.

"Terkait kebutuhan obat-obatan, segera saya koordinasikan dan komunikasikan dengan Kemenkes. Saya berharap masyarakat tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan 3M sebisa mungkin karena pandemi belum berakhir. Saya meminta pemerintah daerah agar menyediakan sarana air bersih, alat cuci tangan dan masker di lokasi pengungsian. Jangan sampai kita lengah dan lalai yang akan menambah kesulitan," katanya.

Terakhir, Netty mengajak masyarakat berdoa kepada Allah SWT agar cepat mengangkat ujian ini dari bumi Indonesia.

"Dengan terus memohon pada Allah, masyarakat Banjarbaru akan bangkit dan melewati ujian ini dengan baik."

Bencana Alam

PKS Kota Semarang Terjunkan 443 Relawan dan Bagikan Puluhan Ribu Paket Bantuan Selama Banjir

Semarang – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Semarang telah menerjunkan 443 relawan untuk membantu penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Kota Semarang pada Sabtu (6/2/2021) lalu.

“Selama sepekan tanggap bencana banjir dan longsor, kita telah menerjunkan 443 relawan yang diperbantukan di 8 kecamatan di Kota Semarang yang terdampak bencana longsor dan banjir, yaitu Kecamatan Genuk, Pedurungan, Gayamsari, Semarang Utara, Semarang Tengah, Semarang Timur, Ngaliyan, Gajahmungkur,” kata Ketua DPD PKS Kota Semarang Suharsono dalam keterangannya, Sabtu (13/2/2021) di Kota Semarang.

Selain menerjunkan relawan, Suharsono mengatakan pihaknya juga sudah menyalurkan berbagai paket bantuan mencapai puluhan ribu paket untuk korban banjir

di semua titik terdampak banjir di Kota Semarang itu. “Adapun rinciannya nasi bungkus 17.453 paket, sembako 1.852 paket, sayuran 1.616 paket, tikar 70 buah, kasur 20 buah, baju layak pakai 3 karung, baju baru 3 lusin, dan juga ada bantuan masker, air bersih untuk korban bencana banjir,” jelasnya.

Lebih lanjut, Suharsono mengatakan pihaknya juga menggandeng anggota Fraksi PKS, baik di tingkat kota, Provinsi atau pusat untuk membantu penanganan bencana.

“Semua anggota fraksi PKS Kota Semarang juga kita minta turun untuk membantu langsung, juga anggota DPRD kita di tingkat Provinsi dan DPR RI serta struktur DPW telah membantu penanganan banjir di Kota Semarang,” papar Suharsono.

Saat ini, kata Suharsono, penanganan terhadap korban

masih terus dilakukan masing-masing DPC, utamanya di daerah yang terdampak banjir cukup parah.

Untuk recovery pasca bencana, Suharsono mengatakan pihaknya juga telah melakukan penanganan dalam bentuk pembagian obat dan vitamin untuk warga.

“Kita para relawan bekerja sama dengan pihak terkait juga turun ke lokasi-lokasi banjir cukup parah, misalnya di Gebanganom Genuk membagikan obat ringan, salep dan vitamin untuk warga,” tandas Suharsono.

Aksi pelayanan kesehatan, imbu Suharsono, juga dikemas dengan pelayanan kesehatan untuk warga terdampak bencana, khususnya di tiga kecamatan.

“DPD melalui bidang sosial kemasyarakatan sinergi dengan pihak terkait juga mengadakan pelayanan



kesehatan, utamanya di Kecamatan Genuk, Gayamsari dan Pedurungan. Adapun kegiatan itu dilaksanakan mulai Ahad 14 Februari 2021,” ujar pria yang juga Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang ini.

Selain itu, untuk agenda pembagian sembako untuk warga terdampak banjir juga

masih terus dilakukan yang dikoordinir oleh masing-masing Dewan Pengurus Cabang (DPC).

“Hari ini, Sabtu juga kita teruskan membagi sembako untuk warga, seperti di Genuk dan Ngaliyan yang didistribusikan langsung oleh relawan PKS ke kampung-kampung,” pungkasnya.

Bencana Alam

Banjir Terjang Kampung Darussalam Batuceper, PKS Kota Tangerang Tanggap Berikan Bantuan

Kota Tangerang -- DPD PKS Kota Tangerang turun memberikan bantuan kepada warga Kampung Darussalam, Kelurahan Batusari, Kecamatan Batuceper, Tangerang yang dilanda banjir setelah hujan deras di wilayah tersebut, Ahad (14/02/2021).

Ketua DPD PKS Kota Tangerang Arief Wibowo didampingi Ketua Bidang Kesejahteraan Sosial Rahmi Silviani, Ketua DPC PKS Batuceper Dade Rahman dan Sekretaris DPC PKS Batuceper Heriyanto menyampaikan bantuannya kepada warga terdampak, khususnya di wilayah RT 03/03.

"Rata-rata ketinggian air mencapai 50 cm. Warga langsung mengungsi ke sanak keluarganya karena lokasi pengungsian yang biasa digunakan urung dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19," tutur Arief memberikan keterangan.

Arief langsung berkoordinasi dengan Ketua RT 03/03 Ujang untuk menyalurkan bantuan dari DPD PKS Kota Tangerang.

"PKS Kota Tangerang menyalurkan bantuan berupa bahan pokok, obat-obatan, serta alat kebersihan. Bantuan yang diberikan sejalan dengan aspirasi warga yang disampaikan melalui Ketua RT setempat saat relawan PKS pertama kali melakukan kunjungan untuk pemetaan dampak banjir," terang Arief.

Arief menekankan PKS Kota Tangerang berkomitmen untuk melakukan kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak bencana.

"Selama ini sudah menjadi tradisi PKS menjadi partai terdepan dalam kegiatan tanggap bencana di seluruh Indonesia," ujar dia.

Dalam kesempatan kunjungan ke wilayah terdampak banjir



tersebut, Arief juga meninjau bersama jajaran RT setempat untuk mendapatkan gambaran lebih lanjut tentang penyebab banjir yang berulang kali terjadi.

"Ini dilakukan untuk merumuskan solusi yang komprehensif terhadap penanggulangan banjir di masa yang akan datang. Dari perumusan masalah yang

dilakukan, selanjutnya akan menjadi bahan bagi anggota legislatif PKS di wilayah tersebut untuk melakukan advokasi perbaikan infrastruktur," ucap Arief.

Bencana Alam

PKS Riau Bangun Masjid untuk Warga Terdampak Gempa Sulawesi Barat



Mamuju -- Bencana bisa datang kapan saja dan dimana saja. Namun persoalan bisa terasa lebih ringan jika banyak saudara yang membantu. Seperti yang dilakukan para relawan PKS Riau yang sengaja didatangkan ke Sulawesi Barat untuk membantu meringankan saudara-saudara terdampak gempa.

Selama hampir satu bulan

relawan PKS berada di Sulawesi Barat, sejak tanggal 1 Februari 2021 hingga sekarang. Berbagai kegiatan terus dilakukan, bersinergi dengan relawan dan warga setempat. Salah satunya pembangunan sementara masjid Nurul Taufiq Deking untuk warga terdampak gempa, di Desa Lombong Kecamatan Malunda.

Ketua panitia pembangunan

masjid, Basaruddin, mengucapkan terimakasih kepada para relawan PKS yang telah mempersembahkan masjid untuk warga. Sehingga mereka dapat beribadah dengan nyaman.

"Kami pengurus masjid yang ada di sini mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman relawan dari

"Kami pengurus masjid yang ada di sini mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman relawan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Insyallah masjid ini menjadi pemberat amal bagi teman-teman PKS,"

Dr. Marsudi Budi Utomo

Wakil Ketua Majelis Syura PKS

Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Tidak ada ucapan yang pantas mewakili, tapi kami akan senantiasa menyelipkan dalam do'a-do'a kami agar Allah SWT memberikan keberkahan. Insyallah masjid ini menjadi pemberat amal bagi teman-teman PKS. Aamiin," tuturnya.

Selain membangun masjid, relawan PKS Riau juga menyalurkan bantuan sembako, selimut, pembangunan MCK (mandi, cuci, kakus) umum, pengadaan

dapur umum, hingga membangun hunian sementara untuk korban gempa.

"Alhamdulillah, setelah membangun kembali beberapa masjid sementara dan menyalurkan bantuan lainnya. Kemarin bersama ketua dan pengurus DPW PKS Sulbar, kami melanjutkan kegiatan peletakan batu pertama hunian sementara untuk warga terdampak gempa," pungkas relawan PKS Riau Cik Ahmad Syukrillah

DPTP

Mimbar Demokrasi Kebangsaan, Habib Salim Ajak Elemen Bangsa Perbaiki Demokrasi Indonesia

"Kondisi demokrasi kita saat ini cukup memprihatinkan dan bisa dikatakan ada di persimpangan jalan. Oleh sebab itu diperlukan upaya saling bergandengan tangan antara seluruh elemen bangsa agar apa yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa bisa tercapai. Saya harap akan muncul anak-anak muda demi memberikan ide gagasan khas anak muda untuk perbaikan bangsa. Generasi muda dengan berbagai inovasi dan kreativitasnya harus muncul dan bangkit dalam memberikan kontribusinya bagi bangsa Indonesia agar bisa unggul dibandingkan dengan bangsa lain dan menyumbangkan pemikirannya bagi bangsa yang kita cintai,"

Disampaikan dalam pembukaan Mimbar Demokrasi Kebangsaan yang digelar Fraksi PKS DPR RI, Jumat, (12/02/2021).

Habib Dr. Salim Segaf Aljufri

Ketua Majelis Syura PKS



DPTP

Presiden PKS: Kami Sedih Indonesia Masuk Ke dalam Negara Cacat Demokrasi

"Indonesia masuk dalam kategori cacat demokrasi, dengan indeks demokrasi yang mengalami penurunan dengan skor 6,3. Menjadi skor terendah dalam 14 tahun terakhir,"

H. Ahmad Syaikh

Presiden PKS

Jakarta (12/02) — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikh menyampaikan pendapatnya mengenai indeks demokrasi Indonesia yang mengalami penurunan dan menjadi yang terendah selama 14 tahun terakhir berdasarkan data dari The Economist Intelligence Unit (EIU).

"Indonesia masuk dalam kategori cacat demokrasi, dengan indeks demokrasi yang mengalami penurunan dengan skor 6,3. Menjadi skor terendah

dalam 14 tahun terakhir," tegas Presiden PKS Ahmad Syaikh di Launching Mimbar Demokrasi Kebangsaan FPKS DPR RI pada hari Jumat, (12/02) secara Virtual

Selain itu, Ahmad Syaikh menyampaikan pendapat bahwa penegakan hukum pada saat ini seperti runcing kepada rakyat yang mengkritisi pemerintah.

Ahmad Syaikh mempertanyakan bagaimana



kasus – kasus penegakan hukum terlalu runcing kepada rakyat kecil, tetapi oknum yang menjadi provokator dan rasialis seakan kebal hukum.

"Substansi demokrasi adalah terwujudnya rasa keadilan dan kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia," ucap Ahmad Syaikh.

Presiden PKS ini menyinggung

juga mengenai partisipasi publik yang semakin tergerus dan tidak dilibatkan secara penuh dalam mengambil kebijakan.

"Berbagai demonstrasi yang massive seolah dianggap angin lalu oleh pemangku kebijakan. Padahal partisipasi publik sangat penting dibuthkan dalam rangka menciptakan good governance," tegas

beliau.

Sebelumnya, Ahmad Syaikh menyampaikan berdasarkan data pada Oktober 2020, kebebasan sipil di Indonesia semakin terancam. Hal ini didukung oleh data bahwa adanya 158 pelanggaran dan serangan kepada kebebasan sipil yang mengkritisi Pemerintah.

DPTP

Enam Arahan Presiden PKS kepada Pengurus se-Sumbagut

Pekanbaru - Presiden PKS, H. Ahmad Syaikhu melantik Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dan Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS Aceh. Dalam pelantikan itu Ahmad Syaikhu mengatakan bahwa pengurus PKS telah dapat mulai bekerja menyusun dan melaksanakan program-program pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pidatonya, setelah melantik pengurus PKS (6/2/2021), Presiden PKS menyebutkan ada enam arahan yang harus dilaksanakan oleh pengurus PKS.

"Pertama, Luruskan Niat. dari awal, tengah hingga sampai akhir. Mengapa ini menjadi penting ?, karena niat yang lurus semata-mata mengharap Ridho Allah SWT menjadi kata kunci pentingnya pengorbanan dan dedikasi kita di partai PKS. Bukan hanya sekedar kerja keras, tetapi kita ingin kerja-kerja kita berujung kepada amal sholeh yang diterima Allah SWT," ujar dia. "Kedua, Mengokohkan Soliditas

Struktur Organisasi Disemua Level. Karena itu adalah kunci kemenangan. Apa kunci terwujudnya soliditas struktur ?, yaitu hadirnya loyalitas pada organisasi dan ketaatan kepada pemimpin. Sepanjang pemimpin itu dalam ketaatan kepada Allah, tidak mengajak kepada kemaksiatan, maka wajib kita dukung dengan militansi yang tinggi dan kerja-kerja bersama. Sehingga menjadi kekuatan yang tersusun rapi dan kokoh," paparnya.

"Ketiga, Kerahkan segenap kemampuan atau kesungguhan kita. Kesungguhan terbaik kita adalah pelayanan, pemberdayaan dan pembelaan terhadap kepentingan rakyat. Inilah sesungguhnya yang diinginkan oleh Allah SWT sesuai dengan yang difirmankan-Nya dalam Al-Qur'an surah Al-Haj ayat 38. Maka, bersungguh-sungguhlah berjuang untuk mencapai target yang diharapkan."

"Keempat, memiliki Integritas

moral yang kuat. Selain itu, kita harus inovatif, berjiwa patriot serta memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Itu merupakan ciri kader PKS, untuk melahirkan kepemimpinan bangsa sesuai dengan nilai-nilai pendiri bangsa Indonesia. Walau ini sulit, tapi kita berusaha dengan segenap kemampuan untuk mewujudkannya. Mewujudkan kepemimpinan yang menghadirkan pelayanan terbaik bagi rakyat, membawa kemajuan bagi bangsa," ungkap Syaikhu.

"Kelima, tidak terjerat kasus-kasus hukum. Baik kasus-kasus moral, kasus-kasus etik yang dapat menciderai nilai-nilai perjuangan partai. Semoga Allah jaga kita semua, insyaAllah."

"Terakhir yang keenam, Memperkuat Ketahanan Politik. Mengapa ini penting, karena bisa saja ada upaya pihak lain yang ingin mengacaukan barisan kita. Nah, jadi kita perlu memperkokoh ketahanan politik kita dan berjuang sekuat



"Selamat atas dilantiknya pengurus DPW dan MPW PKS se-Sumbagut. Selamat melayani rakyat, berikan yang terbaik untuk rakyat,"

tenaga kita, di semua level. Mari kita berpegangan tangan untuk menjaga ketahanan politik kita," imbuhnya.

Menutup arahnya, Presiden mengingatkan jika dikemudian ada hal-hal atau masalah yang perlu didiskusikan, dirinya berharap semua kader untuk saling terbuka berpendapat dan berlapang dada, agar berbagai persoalan dapat

diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

"Itulah pesan yang ingin saya sampaikan kepada seluruh pengurus dan kader PKS. Selamat atas dilantiknya pengurus DPW dan MPW PKS se-Sumbagut. Selamat melayani rakyat, berikan yang terbaik untuk rakyat," tutupnya.

DPTP

Habib Aboebakar: PKS Bali Harus Menjadi Rahmatan Lil Alamin

"PKS menargetkan capaian 15% suara pada pemilu 2024 yang akan datang. Karena itu kedepan, tidak boleh lagi kita dengar komentar PKS itu eksklusif, susah bergabung dengan PKS, jangan ada lagi. "

Habib Aboe Bakar Alhabsyi, SE

Sekretaris Jenderal PKS



Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi memberikan arahan dalam Pelantikan struktur DPTW PKS Bali (Rony/PKSFoto)

Denpasar (12/2/2021) -- DPP PKS secara resmi melantik struktur pengurus wilayah PKS Bali di sebuah hotel kawasan Kota Denpasar. Sekjen DPP PKS Habib Aboebakar Alhabsyi hadir secara daring melalui aplikasi Zoom.

Dalam sambutannya ia menyampaikan bahwa PKS menargetkan capaian 15% suara pada pemilu 2024 yang akan datang. Karena itu ia menekankan pentingnya PKS Bali untuk menunjukkan bahwa partainya adalah rahmat bagi semua pihak.

"Karena itu kedepan, tidak boleh lagi kita dengar komentar PKS itu eksklusif, susah bergabung dengan PKS, jangan ada lagi", ujarnya.

Hingga tahun 2024 nanti, PKS Bali ditargetkan dapat merekrut 8 ribu orang kader dan meraih 1 kursi DPR-RI. Dengan terus memberikan pelayanan kepada masyarakat pulau Bali dan membuktikan bahwa PKS adalah partai Islam yang rahmatan lil 'alamin.

Selanjutnya pelantikan pengurus dilakukan oleh Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan Wilayah Bali-NTB-NTT H. Johan

Rosihan, ST yang hadir lokasi acara bersama jajaran pengurus Bidang Pembinaan Wilayah. Pelantikan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dan Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS Bali ini diawali dengan pembacaan ikrar oleh seluruh pengurus, diikuti dengan penandatanganan pakta integritas.

Dalam arahnya, Johan menyampaikan kembali 4 pilar kemenangan PKS kawasan tenggara Republik Indonesia (SanTRI) yang meliputi wilayah provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

"Kita di Bidang Pembinaan Wilayah SANTRI mempunyai 4 pilar kemenangan. Pertumbuhan kader yang baik, struktur yang solid, basis sosial, dan tersedianya dana operasional. Inilah yang harus menjadi fokus perhatian kita untuk meraih kemenangan pada pemilu yang akan ", ujar anggota DPR-RI dari daerah pemilihan NTB 1 (Pulau Sumbawa) ini.

Untuk diketahui, sehari sebelumnya Johan juga melantik pengurus PKS NTB di Mataram, Lombok (10/2/2021).

DPTP

PKS Dukung Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional untuk Ulama Pejuang

“Saya sebagai santri, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai Partai Islam rahmatan lil alamin yang mementingkan untuk bisa bersama seluruh komponen berkhidmat untuk masalah Umat dan Bangsa, sangat mendukung penganugerahan gelar Pahlawa Nasional itu. Dan sangat wajar bila secara resmi PKS sangat mendukung penuh usulan dan rencana penganugerahan gelar Pahlawan Nasional untuk kedua Ulama Pejuang tersebut. Dukungan resmi terhadap penganugerahan gelar Pahlawan Nasional itu disampaikan oleh Ketua FPKS DPR RI, Dr Jazuli Juwaini, saat melaunching program Mimbar Demokrasi dan Kebangsaan di Fraksi PKS di DPR RI,”

Dr. Hidayat Nur Wahid

Wakil Ketua MPR RI



**DPTP**

Ahmad Syaikhulillah Minta PKS DKI Jakarta Bersiap Menang Pilgub DKI

“Kita harus senantiasa mempersiapkan diri dalam menyongsong kemenangan di Pilkada Jakarta pada tahun 2022 mendatang, jika tidak ada Pilkada tidak apa-apa, yang terpenting kita sudah mempersiapkan diri. Ada dua fokus yang menjadi tujuan kita di periode 2020-2025, yaitu peningkatan jumlah kader serta peningkatan suara dan kursi,”

H. Ahmad Syaikhulillah
Presiden PKS

DPTP

Pesan Presiden PKS untuk Pengurus PKS Jatim

"Karena kita punya juga harus mengawal bagaimana kepala desa punya kepedulian, integritas sehingga bisa berkontribusi positif untuk masyarakat. Para pengurus PKS Jatim, baik di wilayah, kabupaten atau kota, kecamatan bahkan di level desa harus gercep, gerak cepat merespon berbagai permasalahan di masyarakat,"

H. Ahmad Syaikhul

Presiden PKS



Pelantikan pengurus Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) dan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Jatim dilantik langsung oleh Presiden PKS, Ahmad Syaikhul, Ahad (14/2) di Dyandra Convention Hall Surabaya. Dalam kesempatan itu, pria yang kerap dipanggil Pak Asyik itu memberi pesan khusus untuk pengurus PKS Jatim.

Ia mengatakan bahwa aspek yang terpenting harus diperhatikan adalah bagaimana partai makin dipercaya oleh masyarakat.

Untuk itu, ia berpesan bahwa pengurus harus berusaha memantaskan diri, mendapatkan kepercayaan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk memimpin.

"Jika belum berkesempatan untuk memimpin daerah, ini jadi introspeksi diri, mungkin kesolehan kita belum seperti yang Allah harapkan," ujarnya mengingatkan.

Selain itu, Presiden PKS juga mengingatkan bagaimana pengurus wilayah bisa membantu kemenangan-kemenangan hingga di tataran desa.

"Karena kita punya juga harus mengawal bagaimana kepala desa punya kepedulian, integritas sehingga bisa berkontribusi positif untuk masyarakat," katanya.

Setelah itu, ia membuat perumpamaan seperti perlombaan lari. Ia berpesan bahwa pengurus harus melihat sebagai lari maraton, bukan lari sprint.

Dalam maraton, ia menjelaskan, yang harus dipersiapkan adalah punya endurance, daya tahan yang kuat, konsistensi, dan punya kesabaran yang tinggi.

Senada dengan Presiden PKS, Irwan Setiawan, Ketua DPW PKS juga menguatkan pesan untuk lebih jeli melihat permasalahan masyarakat.

"Para pengurus PKS Jatim, baik di wilayah, kabupaten atau kota, kecamatan bahkan di level desa harus gercep, gerak cepat merespon berbagai permasalahan di masyarakat. Tugas kita meringankan berbagai permasalahan itu," harap Irwan.

DPTP

Pelantikan Pengurus PKS Provinsi Banten, Sekjen: Munculkan Ide Cerdas untuk Pemenangan 2024

“Untuk kemenangan 2024 dari sekarang sudah harus jelas. Jangan main-main nih! Banten jangan merasa bangga oleh 11 kursi. Kalau perlu jadilah role model untuk wilayah lain. Untuk menyelesaikan itu tentu Banten perlu membuat ide-ide cerdas, ide-ide dinamis, ide-ide fresh tentang bagaimana kita memenangkan kemenangan 2024. Intinya cuma dua. Menangkan semua Pileg atau tingkat elektoral dan yang kedua kader diperbanyak. Oleh karena itu unit-unit kerja di DPW yang hari ini dilantik harus memahami dengan baik tujuan utama kita, sehingga nanti kegiatan dan program yang dilaksanakan harus bermuara pada dua capaian tersebut,”

Habib Aboe Bakar Alhabsyi, SE

Sekretaris Jenderal DPP PKS

DPTP

Aher Puji Budaya Ngopi Subuh di Aceh



"Alhamdulillah pagi ini setelah sholat subuh saya diajak minum kopi di warung kopi (warkop) Budi Banda Aceh. Saya melihat pemandangan luar biasa ada budaya silaturahmi yang bagus, setelah sholat subuh dan dzikir bersama-sama lalu mereka menyegarkan tubuh dengan minuman yang sangat menyehatkan sebelum beraktivitas pagi, budaya ini disebut dengan kopi subuh,"

Ahmad Heryawan, Lc., M.Si

Wakil Ketua Majelis Syura PKS

Aceh -- Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Ahmad Heryawan puji budaya ngopi subuh di Aceh. Hal itu disampaikan saat diajak minum kopi pagi bersama struktur DPW PKS Aceh.

"Alhamdulillah pagi ini setelah sholat subuh saya diajak minum kopi di warung kopi (warkop) Budi Banda Aceh.

Saya melihat pemandangan luar biasa ada budaya silaturahmi yang bagus, setelah sholat subuh dan dzikir bersama-sama lalu mereka menyegarkan tubuh dengan minuman yang sangat menyehatkan sebelum beraktivitas pagi, budaya ini disebut dengan kopi subuh," ungkap pria yang akrab disapa Aher ini di Budi Warkop, Banda

Aceh, Selasa (16/02/2021).

Pria yang pernah memecahkan rekor seduh kopi dengan seribu barista ini menyebutkan bahwa kopi sangat bagus untuk kesehatan tubuh dan dapat mencegah berbagai penyakit.

"Kopi adalah minuman yang dapat menyehatkan badan, dapat mencegah penyakit

kanker, jantung dan pikun. Jadi budaya kopi subuh di Aceh ini sangat bagus," tambah Aher.

Gubernur dua periode ini juga mengajak masyarakat Aceh dan masyarakat Indonesia untuk turut melestarikan budaya kopi subuh Aceh.

"Saya mengajak masyarakat Aceh, Indonesia dan khusus

daerah asal saya Jawa Barat untuk meniru budaya kopi subuh di Aceh. Habis sholat subuh, dzikir dan dilanjutkan dengan menyegarkan badan dan pikiran, ngopi sebelum beraktivitas dipagi hari," tutup Aher.

DPTP

Pesan Presiden PKS Usai Lantik Dewan Pengurus Tingkat Wilayah PKS Sumsel

"Fokus aktifitas kita hanya pada 2 hal. Menambah jumlah kader dan meningkatkan kualitas kader, yang kedua menambah jumlah suara dan jumlah kursi. Lalu yang kedua mengokohkan soliditas struktur organisasi partai di semua level, mulai dari DPP, DPW, DPD, DPC hingga DPRa. Yang ketiga, kerahkan segenap kemampuan dalam pelayanan, pemberdayaan dan pembelaan terhadap kepentingan rakyat. Keempat, lanjut Syaikhu, memiliki integritas moral yang kuat, inovatif, berjiwa patriotik serta memiliki nasionalisme yang tinggi. Terakhir, Syaikhu menginstruksikan semua kadernya untuk bersilaturahmi kepada siapapun,"

H. Ahmad Syaikhu
Presiden PKS

DPTP

Berkunjung ke Aceh, Aher Semangati DPTW PKS Aceh

“Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk silaturahmi dengan dengan pimpinan struktur DPTW PKS Aceh untuk melakukan pengukuhan lebih lanjut. Ada 2 sasaran besar yang harus serius kita jalankan, ini adalah tujuan yang akan kita capai. Pertama adalah penambahan jumlah kader tiap-tiap DPW hingga DPRa bahkan TPS. Kedua adalah bertambahnya suara, hal ini ditandakan dengan bertambahnya jumlah kursi di DPRD tingkat Kota dan Kabupaten serta DPRD Provinsi terlebih kursi di DPR RI, itu yang kita canangkan. Saya sebagai Wakil Ketua Majelis Syura PKS yang membidangi kaderisasi datang silaturahmi untuk ikut memberikan arahan bagaimana peta jalan yang harus dibuat untuk mencapai penambahan kader maupun capaian kursi tersebut,”

Ahmad Heryawan, Lc., M.Si

Wakil Ketua Majelis Syura PKS



DPTP

Habib Aboe Soroti Maraknya Peredaran Narkoba dari Dalam Lapas

“Hal yang menjadi atensi utama saya adalah soal peredaran narkoba di lapas dan peredaran narkoba yang dikendalikan di Lapas. Misalkan saja di lapas cipinang, dalam beberapa waktu terakhir menjadi atensi masyarakat, karena adanya dugaan pengendalian peredaran Narkoba dari dalam lapas Cipinang. Harus ada evaluasi yang mendasar tentang pengamanan di Lapas Cipinang, tentunya seorang napi seharusnya tidak bisa mengendalikan peredaran narkoba, karena seharusnya tidak bisa berkomunikasi dengan pihak luar. Saat dengan Kanwil kemenkumham DKI saya minta agar kakanwil memperhatikan hal ini dengan baik. Jangan sampai masyarakat melihat seolah lapas menjadi surga untuk peredaran narkoba,”

Habib Aboe Bakar Alhabsyi, SE

Sekretaris Jenderal PKS





DPTP

Pelantikan Pengurus MPW dan DPW Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat

“PKS harus jadi rahmatan lil alamin, mengayomi seluruh kelompok dan golongan, termasuk memberikan kesempatan kepada tokoh lokal untuk bergabung dan menjadi Caleg PKS,”

Habib Aboe Bakar Alhabsyi, SE
Sekretaris Jenderal PKS

DPTP

Presiden PKS Berikan Solusi Masalah Harga Daging Sapi yang Terus Naik

"Ketergantungan Indonesia akan impor sapi dan daging sapi ini akan terus berlanjut selama kapasitas produksi daging lokal belum mampu mencukupi kebutuhan konsumsi per kapita dalam negeri. Yang harus kita benahi disini adalah sisi hulunya, yakni produksi daging sapi lokal. Ketahanan pangan lebih menekankan kepada ketersediaan, keterjangkauan, aksesibilitas. Sedangkan konsepsi kedaulatan pangan lebih kepada kemandirian, kesinambungan, pertahanan dan keamanan. Tata kelola niaga ekspor dan impor harus fair dan transparan, penegakkan hukum juga harus tegas kepada para spekulan. Hambatan-hambatan yang mendistorsi harga harus dihilangkan. Rantai penawaran juga harus dipangkas"

H. Ahmad Syaikhu
Presiden PKS



DPTP

Serap Aspirasi WNI di Jerman, HNW Sampaikan Nilai Pancasila dalam Pandemi

Jerman-- Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengadakan acara silaturahmi dan penyerapan aspirasi secara daring pada hari Ahad (21/02/2021). Acara yang diadakan secara rutin setiap memasuki masa reses merupakan upaya dari pria yang akrab disapa HNW untuk menjaga komunikasi dengan konstituennya yang meliputi daerah pemilihan luar negeri.

Pada kesempatan silaturahmi kali ini HNW berkesempatan menyapa masyarakat umum yang berdomisili di Jerman, Swiss, Polandia, dan Austria. Acara diberi tajuk "Menelaah Nilai-Nilai Pancasila dan Demokrasi Dalam Terapannya di Krisis Pandemi COVID-19" diselenggarakan oleh PIP (Pusat Informasi dan Pelayanan) PKS Jerman.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini mengatakan, serap aspirasi adalah kegiatan rutin yang digelar untuk menjaga

komunikasi dengan konstituennya. HNW mengaku wajib mendengar aspirasi dari warga negara Indonesia yang berdomisili di luar negeri sebagai bagian dari Dapil II DKI Jakarta.

HNW juga menyampaikan korelasi Jerman dengan demokrasi Indonesia. Prof Habibie, yang dibesarkan oleh Jerman, menjadi presiden pertama setelah Orde Baru dan menjadi ikon demokrasi dengan aksi-aksinya termasuk bagaimana Prof Habibie mempercepat pelaksanaan pemilu. Selain itu juga, HNW bercerita bagaimana peneliti Jerman keturunan Turki yang berhasil membuat vaksin Covid-19 lewat perusahaan Biontech.

Wakil Ketua MPR RI ini menjelaskan bagaimana kaitan setiap sila Pancasila dengan Covid-19. "Sesuai sila Persatuan Indonesia, seharusnya Covid-19 ini juga membawa solidaritas kepada bangsa Indonesia," kata Hidayat.

Beberapa kejadian belakangan terutama tentang posisi PKS dalam berbagai permasalahan di dalam negeri, termasuk korupsi bantuan sosial, UU Omnibus Law Cipta kerja, data-data seputar pandemi yang tidak akurat, UU Haluan Ideologi Pancasila juga ikut dipaparkan.

"Adanya COVID-19 menjadikan persidangan di DPR dibatasi baik jumlah dan masa sidangnya, tetapi dalam peran pembuatan legislasi tetap dilakukan dengan cara yang secermat mungkin, yang kadang hanya menghadirkan banyak-banyakan jumlah, kadang bisa menghadirkan koreksi sebagian, kadang bisa menghadirkan koreksi keseluruhan. Itulah tadi dinamika Pancasila, dimana pandemi ini pun tetap bisa menghadirkan produktivitas," simpul Anggota DPR komisi VIII ini tentang aktivitas legislatifnya dan PKS secara umum.

Duta Besar Republik Indonesia



Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid pada acara silaturahmi dan penyerapan aspirasi secara daring dengan WNI di Jerman

untuk Jerman, Arif Havas Oegroseno yang hadir berkesempatan membuka acara. Pada sambutannya, Havas menyampaikan beberapa hal diantaranya tentang rencana pendirian gedung baru KBRI untuk menggantikan gedung sewaan KBRI sekarang, update berita seputar Covid-19 di Jerman, dan laporan beberapa mahasiswa Indonesia yang mendapatkan posisi magang di Bundestag (DPR Jerman).

Sekitar 250 peserta terlihat antusias mengikuti acara yang

berlangsung selama kurang lebih 2 jam. Antusiasme ini dapat terlihat dari banyaknya pertanyaan dan tanggapan yang diajukan selama acara berlangsung.

Di sela-sela acara, penyelenggara juga membagikan beberapa voucher kepada para peserta dengan nilai total 100 Euro. Voucher ini dapat dicairkan untuk berbelanja pada beberapa UMKM dari para simpatisan PKS di Jerman dan sekitarnya.

DPTP

HNW Tolak Penghapusan Santunan untuk Korban Meninggal Covid-19 Oleh Kemensos

"Ketergantungan Indonesia akan impor sapi dan daging sapi ini akan terus berlanjut selama kapasitas produksi daging lokal belum mampu mencukupi kebutuhan konsumsi per kapita dalam negeri. Yang harus kita benahi disini adalah sisi hulunya, yakni produksi daging sapi lokal. Ketahanan pangan lebih menekankan kepada ketersediaan, keterjangkauan, aksesibilitas. Sedangkan konsepsi kedaulatan pangan lebih kepada kemandirian, kesinambungan, pertahanan dan keamanan. Tata kelola niaga ekspor dan impor harus fair dan transparan, penegakkan hukum juga harus tegas kepada para spekulan. Hambatan-hambatan yang mendistorsi harga harus dihilangkan. Rantai penawaran juga harus dipangkas"

Dr. Hidayat Nur Wahid

Wakil Ketua MPR RI



DPTP

Pelantikan Pengurus DSW PKS Aceh, Surahman Hidayat: Tingkatkan Pelayanan untuk Rakyat

Dr KH Surahman Hidayat
Ketua Dewan Syariat Pusat DPP PKS

“Tingkatkan pelayanan kepada rakyat dengan penuh keramahan, senyuman, dan cinta. Hal tersebut sebagaimana tagline yang PKS miliki, yaitu Bersama Melayani Rakyat,”

Badan Bidang

PKS Ingatkan GNWU Harus Tetap Jadi Dana Sosial Keagamaan

“Oleh sebab itu, Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) tetap harus menjadi bagian dari dana sosial keagamaan yang peruntukannya untuk kepentingan Umat Islam secara khusus dan masyarakat secara umum. Wajar jika sebagian masyarakat menilai bahwa Pemerintah memerlukan sumber pendanaan untuk membiayai pembangunan. Walaupun Kementerian Keuangan dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah menyampaikan klarifikasi bahwa dana yang terkumpul dari GNWU tidak masuk ke dalam kas negara. Tetapi, seluruh dana yang terkumpul dari GNWU, sepenuhnya masuk ke badan-badan yang mengurus dana wakaf atau para nazir,”

Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag.,M.Si.

Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan DPP PKS

Badan Bidang

PKS Ajak Perempuan Indonesia Biasakan Pola Hidup Sehat untuk Cegah Kanker

"Maka penting bagi kita perempuan Indonesia untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebagai satu ikhtiar dalam pencegahan kanker,"

Dr. Kurniasih Mufidayati

Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga

Jakarta -- Perempuan Indonesia harus semakin waspada dalam mengantisipasi bahaya kanker. Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) Kurniasih Mufidayati mengajak perempuan Indonesia untuk menerapkan pola hidup sehat untuk mencegah kanker.

Mufida menyebut 90-95 persen penyebab kanker berasal dari gaya hidup seperti pola makan tidak sehat, obesitas, infeksi, minuman beralkohol termasuk merokok.

"Maka penting bagi kita perempuan Indonesia untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebagai satu ikhtiar dalam pencegahan kanker," Mufida dalam peringatan Hari Kanker

Sedunia, Kamis (4/2/2021).

Mufida mengatakan, penderita kanker di Indonesia pada 2018 mencapai 348.000 kasus atau 1.362 kasus per 1 juta penduduk, dengan total kematian sebanyak 207.000 kasus.

Data yang dirilis Global Cancer Observatory ini menunjukkan angka kejadian tertinggi pada perempuan adalah kanker payudara dengan total 58.256 kasus (30,9%), disusul kanker serviks sebanyak 32.469 kasus (17,2%), dan kanker ovarium 13.310 kasus (7,1%).

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), prevalensi tumor/kanker di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan dari 1.4

per 1000 penduduk di tahun 2013 menjadi 1,79 per 1000 penduduk pada tahun 2018.

"Melihat data tersebut perempuan adalah pihak yang paling rentan dalam bahaya penyakit kanker di Indonesia. Belum lagi kanker paru yang juga turut menyerang perempuan," kata dia.

Mufida menyebut, edukasi soal kanker terhadap perempuan harus dilakukan sampai level terendah dalam hal ini Puskesmas. Peran Puskesmas juga harus dikuatkan untuk melakukan edukasi pencegahan dan pengobatan penyakit kanker.

"Puskesmas harus punya kemampuan melakukan deteksi dini untuk kanker



payudara, kanker serviks dan ovarium. Tenaga medis di Puskesmas juga harus mendapat pelatihan untuk melakukan pengobatan awal sebelum nantinya mendapat rujukan ke faskes lebih tinggi," papar Mufida.

Mufida menyebut, keberhasilan menekan penyakit kanker adalah keberhasilan dalam melakukan deteksi dini. Ia mendorong setiap perempuan bisa melakukan deteksi dini kanker meskipun tidak ada gejala.

"Deteksi dini ini vital sekali

dalam upaya menekan penyakit kanker. Perempuan Indonesia bisa mengakses Pemeriksaan Payudara Klinis (SADANIS) untuk deteksi dini kanker payudara dan Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA) untuk deteksi dini kanker leher rahim," ujar dia.

"Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga PKS mendukung gerakan hidup sehat termasuk kolaborasi dengan Bidang Kepanduan dan Olahraga untuk memasyarakatkan senam Nusantara di rumah," imbuhnya lagi.

Badan Bidang

PKS Minta BI Membangun Sistem Keuangan Syariah yang Terintegrasi



Jakarta -- Dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Dewan Gubernur Bank Indonesia pada Selasa (9/2/2021) di Jakarta, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati menyampaikan apresiasi kepada BI atas peran dan kontribusinya dalam

mengembangkan ekonomi Syariah. Selain itu, Anis juga menyampaikan beberapa catatannya.

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini mengatakan bahwa pada dasarnya sistem ekonomi syariah terintegrasi

satu dengan yang lain. Lembaga Keuangan Syariah harus terintegrasi dengan sektor riil dalam membentuk eksistim ekonomi syariah.

Lembaga Keuangan Syariah perlu berbenah untuk mewujudkan Lembaga yang

terintegrasi, antara industri perbankan syariah dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) serta Lembaga sosial keagamaan (zakat dan wakaf). "Saya mendorong BI agar bisa berperan menjadi faktor pendorong dalam mewujudkan gagasan sistim ekonomi dan keuangan syariah yang terintegrasi," katanya.

Selanjutnya, Anis membahas tentang komitmen BI dalam pengembangan ekonomi digital. Salah satu titik lemah yang dimiliki oleh Perbankan Syariah nasional adalah pengembangan sistem informasi teknologi (IT) yang terkesan lamban.

Sehingga jauh tertinggal dengan Bank Konvensional. Hal ini bisa dimaklumi, mengingat pengembangan sistem IT di lembaga keuangan memerlukan investasi dana yang besar. Bahkan BRI berani mengeluarkan investasi besar untuk memiliki satelit sendiri, agar mampu mengembangkan sistem IT yang lebih unggul.

"Tentunya kita berharap, bank-bank syariah juga fokus mengembangkan sistem IT yang mampu meningkatkan daya saingnya. Terutama dalam

mengantisipasi perkembangan industri financial technology (fintech). Dengan sistem IT yang memadai, diharapkan bank Syariah bisa tumbuh dan berkembang bersama dalam meningkatkan layanan dan memperluas segmentasi pasar. Saya minta BI ikut mendorong hal ini," ungkap Anis.

Dalam kaitannya dengan UMKM, Anis menilai salah satu yang paling bermasalah adalah ketersediaan dan akurasi data. Pada titik ini, Anis berharap BI dapat berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan tersebut. "Kita jangan terlalu jauh berbicara UMKM go digital kalau data UMKM saja tidak punya," tandasnya.

Adapun dalam kaitannya dengan ekonomi digital, politisi senior PKS ini memandang bahwa regulator seringkali berada di belakang industri digital. Sehingga regulasi yang dikeluarkan out of date.

"Saya sarankan BI mengambil peran dalam pelaksanaan regulasi ini. Karena banyak masalah lain pada ekonomi digital seperti konglomerasi dan kerahasiaan data," tutupnya

Badan Bidang

PKS: Dana Desa Mencukupi untuk Karantina Desa

"Penanganan Covid-19 yang terencana dengan baik akan memberikan pencapaian Target, khususnya pembangunan di desa berdasarkan SDGs desa terukur dengan jelas,"

Yoandro Edwar

Sekretaris Bidang Pembinaan dan Pengembangan Desa DPP PKS

Jakarta -- Bidang Pembinaan dan Pengembangan Desa DPP PKS menyebut dana desa mencukupi untuk melakukan karantina di tingkat desa untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Sekretaris Bidang Pembinaan dan Pengembangan Desa DPP PKS Yoandro Edwar menyebut, dana desa bisa digunakan dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro di Desa sesuai Instruksi No 1 Tahun 2021 mengenai Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Instruksi ini diberikan kepada

para kepala desa di Jawa dan Bali yang menyebut Dana Desa dapat digunakan untuk kebutuhan PPKM. Dana Desa bisa digunakan sebagai Bantuan Langsung Tunai (BLT) maupun sosialisasi dan edukasi pencegahan Covid-19 Di Desa.

"Hal ini seharusnya dapat dimanfaatkan maksimal oleh Kepala Desa untuk secara efektif menekan laju penyebaran Covid-19," kata pria yang akrab disapa Iken ini dalam keterangannya, Sabtu (13/2/2021).

Iken mengungkapkan, karantina desa yang pernah marak di awal pandemi ini

muncul seharusnya dilaksanakan kembali, agar benar-benar memfilter, menghambat laju penyebaran virus. "Melakukan tracing intensif, testing lebih cepat agar penanganan bisa terselesaikan segera," kata dia.

Iken menerangkan, dengan rata-rata dana Desa senilai Rp 960 Miliar, dana untuk isolasi

tersedia, baik isolasi mandiri dengan bantuan BLT maupun dana untuk pembuatan shelter penampungan untuk warga yang bergejala dimana di sebagian RS tidak dapat tertangani lagi. "Keefektifan PPKM Mikro ini akan sangat bergantung action dari Kepala Desa dengan tertib dan disiplin," ujar dia.

Disamping itu, belajar dari

pengalaman tahun 2020 yang melakukan perubahan APBDesa berulang kali, ada baiknya penanganan covid-19 di desa ini lebih menyeluruh, tidak sporadis, serba mendadak. "Penanganan Covid-19 yang terencana dengan baik akan memberikan pencapaian Target, khususnya pembangunan di desa berdasarkan SDGs desa terukur dengan jelas," terang Iken.



Badan Bidang

Antisipasi Putusnya Logistik, Syahrul Aidi Minta Jalan Tol Cipali Cepat Diperbaiki

"Serangkaian kejadian ini dikhawatirkan akan memutus rantai pasok logistik ke Jakarta. Tindakan cepat dan tepat dibutuhkan oleh pemerintah dan pengelola saat ini,"

Syahrul Aidi Mazaat

Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Desa



Jakarta - Jalan Tol Cipali tidak bisa dilewati oleh kendaraan di Kilometer 122+400 arah Jakarta. Amblasnya jalan tol

Cipali diperkirakan akibat curah hujan yang tinggi di wilayah tersebut diperkirakan menjadi penyebab kerusakan ini.

Atas kejadian ini pengelola jalan Tol Cipali memberlakukan contraflow mulai dari Km 117 hingga Km 126. Terkait curah

hujan, sebenarnya BMKG telah memperkirakan bahwa di daerah tersebut diperkirakan akan terpapar oleh intensitas hujan yang tinggi.

Anggota Komisi V DPR RI, Syahrul Aidi Mazaat saat dihubungi pada Selasa (9/2/2021) menyayangkan pengelola jalan tol tidak dapat memanfaatkan informasi tersebut. Akibatnya, kejadian ini menyebabkan terjadinya kemacetan dan terhambatnya arus logistik karena saat ini jalan Tol Cipali hanya dapat digunakan satu jalur.

Sedangkan jalur pantura juga putus karena banjir. Rumitnya lagi, banjir juga menyebabkan jalur kereta juga terputus di Semarang. Sehingga hal ini dapat menyebabkan meningkatnya biaya logistik dan lamanya pengiriman, karena jalur yang masih mungkin dilewati adalah jalur selatan yang lebih jauh.

"Serangkaian kejadian ini dikhawatirkan akan memutus rantai pasok logistik ke Jakarta. Tindakan cepat dan tepat dibutuhkan oleh pemerintah dan pengelola saat ini" kata Syahrul Aidi.

Terkait amblasnya jalan tol

Cipali tersebut, Syahrul Aidi meminta agar pemerintah dan pengelola segera melakukan investigasi penyebab amblasnya jalan tol tersebut, dan membuat kajian agar kejadian serupa dapat diantisipasi dan tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Termasuk perlu dikaji kaitannya dengan pengerjaan awal jalan tol tersebut yang terkesan terburu-buru alias kejar tayang.

"Tetapi apapun hasil investigasinya nanti, sebaiknya pengelola jalan tol tidak menyalahkan faktor alam (hujan). Sebab sekecil apapun pihak pengelola memiliki andil terhadap kejadian ini, karena tidak melakukan antisipasi terhadap tingginya curah hujan yang sudah diprakirakan sebelumnya dan tidak ada kontrol yang kontinu terhadap fisik jalan tol dan lingkungan sekitarnya." tegas Syahrul Aidi.

Jalan Tol Cikopo–Palimanan atau Jalan Tol Cipali adalah sebuah Jalan Tol yang terbentang sepanjang 116 kilometer yang menghubungkan daerah Cikopo, Purwakarta dengan Palimanan, Cirebon, Jawa Barat.

Badan Bidang

Jokowi Minta Dikritik, PKS: Mulai dengan Revisi Pasal Karet UU ITE

"Pernyataan Presiden Jokowi yang meminta agar Pemerintah dikritik harusnya dijawab dengan upaya beliau agar unsur Pemerintah dan aparat lainnya terbuka terhadap berbagai kritik, menutup kemungkinan penggunaan UU ITE untuk membungkam kritik publik, serta melakukan inisiatif untuk melakukan revisi terhadap beberapa pasal "karet" dalam UU ITE, baik inisiatif dari unsur Pemerintah dan juga mendorong inisiatif mayoritas parpol koalisi pemerintah dari unsur DPR untuk bersama-sama melakukan revisi,"

Ahmad Fathul Bari

Wakil Sekretaris Jenderal PKS



Badan Bidang

PKS Dorong Permudah Izin Teknologi Anak Bangsa untuk Atasi Pandemi



Jakarta -- Wakil Ketua Bidang Teknologi Industri dan Lingkungan Hidup DPP PKS Dr Marsudi Budi Utomo mendorong pemerintah untuk menggunakan teknologi karya anak bangsa dalam membantu mengatasi pandemi Covid-19.

Marsudi mengungkapkan, pandemi Covid-19 yang belum menunjukkan penurunan

jumlah membuat segala upaya dalam penanganan pandemi meski dilakukan. Termasuk mendorong produk berbasis teknologi karya anak bangsa.

"Mendorong pemerintah melalui kementerian dan instansi terkait agar menggesa produk-produk berbasis teknologi yang dibuat oleh anak bangsa yang memberi

peran meredam pandemik serta mempermudah proses perijinan atau izin edar produk-produk tersebut," kata Marsudi dalam keterangannya, Rabu (17/2/2021).

Marsudi menyebutkan, DPP PKS mendukung pemerintah segera membuat kebijakan penggunaan secara masif alat-alat berteknologi untuk

"Mendorong pemerintah melalui kementerian dan instansi terkait agar menggesa produk-produk berbasis teknologi yang dibuat oleh anak bangsa yang memberi peran meredam pandemik serta mempermudah proses perijinan atau izin edar produk-produk tersebut,"

Dr. Marsudi Budi Utomo

Wakil Ketua Majelis Syura PKS

penyaringan (screening) Covid-19 buatan dalam negeri, seperti GeNose dan alat-alat sejenis lainnya sebagai alternatif selain test cepat antigen atau PCR, di bandara-bandara, stasiun kereta api, terminal, pabrik-pabrik dan fasilitas publik lainnya.

"Yang tak kalah penting adalah mempercepat alih teknologi, rekayasa teknologi dan proses manufakturnya dalam rangka penanganan pandemi Covid-19

ini. Sehingga pandemi tidak berlarut-larut dan makin menggerus efektivitas ekonomi nasional," tutur dia.

Marsudi mengapresiasi pemerintah yang akhirnya mengumpulkan para pakar epidemiologi setelah ditemukan fakta bahwa PSBB maupun PPKM Nasional dan maupun lokal tidak efektif dalam mengerem pergerakan masyarakat untuk mengurangi sebaran virus Covid-19.

Badan Bidang

Kunjungan ke DPW PKS Aceh, Netty Pastikan Supporting System untuk Kader Perempuan



Banda Aceh -- Ketua Bidang Kesejahteraan Sosial DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani mengunjungi struktur DPW PKS Aceh yang baru saja dilantik, Hotel Kryda, Banda Aceh, Selasa (16/02/2021).

Netty menyampaikan kunjungannya kali ini salah satunya dalam rangka memastikan adanya

supporting system untuk kader perempuan PKS dari struktur DPW.

"Meningat ada dua kader perempuan yang menjadi pejabat publik di PKS, yang satu DPD Lhokseumawe dan satu lagi menjadi Ketua DPD Aceh Timur," terang Netty.

Netty meyakini adanya perempuan bukan sekedar untuk menggenapkan namun

juga bisa menjadi center of life yang menentukan ruang kehidupan dengan peran dan potensinya.

"Kita berharap, mudah-mudahan keberadaan perempuan-perempuan sebagai kader di tengah masyarakat ini akan memastikan ceruk suara perempuan akan banyak diberikan kepada PKS pada

Pemilu 2024," ungkap Netty.

Netty mengatakan kunjungannya tersebut juga dalam rangka membangun semangat serta soliditas di kalangan struktur dan kader.

"Bagaimanapun ketika bicara entitas partai politik maka yang menjadi ujung tombaknya adalah kader, sehingga dengan semangat kebersamaan ini kita mampu menajamkan kerja-kerja advokasi," kata Netty.

Terakhir Netty juga ingin memastikan semua perjuangan yang dilakukan oleh para kader

dapat diartikulasikan menjadi tradisi baik dan bisa diwariskan.

"Salah satunya yang saya sampaikan adalah kritik, catatan atau protes kita kepada pemerintah harus diformulasikan dalam ide dan gagasan, utamanya dalam bentuk tulisan. Karena Verba Volant Scripta Manent, ucapan atau kata-kata kita akan hilang namun tulisan akan tetap abadi," pesan Netty.

Tak ketinggalan Netty menutup wawancaranya dengan sebuah pantun untuk para kader di Aceh,

Kelopak mawar merekah

Tersusun indah di dalam jambangan

Senangnya datang ke Serambi Mekah

Kadernya kompak songsong kemenangan

Dr. Hj. Netty Prasetiyani, M.Si

Ketua Bidang Kesejahteraan Sosial DPP PKS

Badan Bidang

PKS Ingatkan Utang Pemerintah Belum Terbukti Selamatkan Ekonomi Nasional

Jakarta -- Beberapa hari belakangan, berbagai kalangan menyoroti soal utang dan defisit yang dialami pemerintah Indonesia. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat utang pemerintah hingga akhir Desember 2020 mencapai 6.074,56 triliun. Dengan demikian, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 36,68%.

Sementara itu, Pemerintah menargetkan utang baru pada 2021 sebesar Rp 1.177,4 triliun. Sebagian besar utang ini didapat melalui penerbitan surat berharga negara (SBN) Rp 1.207,3 triliun.

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati mengatakan bahwa defisit APBN akan semakin lebar, sebagai akibat dari ekspansi fiskal Pemerintah untuk menyelamatkan perekonomian di saat Pandemi. Hal ini terlihat dengan adanya pelebaran defisit fiskal dari 2,2% pada

tahun 2019, menjadi 6,3% pada tahun 2020. "Dan diperkirakan masih akan defisit sebesar 5,7% di tahun 2021," kata Anis.

Anggota Komisi XI DPR RI ini juga menyampaikan bahwa defisit merupakan langkah normal di saat resesi, akan tetapi ia mengingatkan, "Tetap perlu kehati-hatian dalam melaksanakan kebijakan defisit ini".

Catatan lain yang diberikan oleh Doktor Ekonomi Islam ini, terkait dengan sebagian besar defisit APBN dibiayai oleh utang. Semakin lebar defisit, semakin besar juga utang. "Untuk memaksimalkan pertumbuhan, tentu utang harus digunakan. Tetapi yang sering terjadi adalah Pemerintah justru gagal membelanjakan uang," paparnya.

Hal ini tercermin dari besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) selama 5 tahun terakhir yang mencapai Rp 10-30 Triliun setiap

tahunnya.

Lebih lanjut Anis menjelaskan, pelebaran defisit ini disebabkan oleh tingginya anggaran Penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN). Akan tetapi, data terakhir menunjukkan bahwa realisasi anggaran PEN hingga akhir tahun 2020 belum maksimal, hanya sebesar 83 persen. "Hal ini tentu merugikan, karena utang yang sudah ditarik pemerintah, gagal dimanfaatkan untuk penyelamatan ekonomi nasional," imbuhnya.

Anis juga menyoroti primary balance Indonesia yang dalam beberapa tahun ini selalu tercatat negatif. Ketika primary balance negatif artinya Pemerintah sedang menjalankan kebijakan gali lubang tutup lubang. "Pemerintah menerbitkan utang baru untuk membayar utang yang lama. Hal ini tentu bukan pertanda baik untuk keberlangsungan fiskal Indonesia," tegas Anis



Di tengah pandemi, primary balance Indonesia semakin memburuk. Pada tahun 2020 diperkirakan mencapai -4,3% dan pada tahun 2021 mencapai -3,59%. "Pemerintah harus mewaspadaai lampu kuning dari semakin besarnya negatif primary balance ini, agar fiskal Indonesia lebih sustain untuk tahun-tahun mendatang," ungkap Anis.

Anis memaparkan bahwa pada masa pra-pandemi, debt to GDP ratio Indonesia terus meningkat, dari awalnya 24% pada tahun 2014 menjadi 30,2% di tahun 2019. Meningkatnya debt to GDP

ratio menunjukkan bahwa selama periode tersebut penambahan utang lebih tinggi dibandingkan penambahan PDB. Artinya, utang Pemerintah selama ini belum cukup produktif untuk mendorong PDB nasional.

"Hal ini tentu perlu menjadi catatan penting. Meningkatnya debt to GDP ratio yang mencapai 37% di tahun 2020 dan diperkirakan menjadi 41% pada tahun 2021, merupakan sinyal kurang bagus. Ini berarti Pemerintah akan kesulitan mengendalikan laju utang di masa yang akan datang," pungkasnya.

Badan Bidang

Dukung Upaya Kelestarian Hutan, PKS: Kurangi Deforestasi Besar-Besaran!

“PKS sebagai partai yang peduli terhadap kelestarian lingkungan, mendorong dengan sangat upaya pemerintah untuk mengurangi deforestasi besar-besaran meskipun dengan dalih peningkatan ekonomi dan/atau berfokus mengejar kuantitas investasi. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam kurun waktu 2018-2019 deforestasi dapat mencapai angka 463.458 hektare. Ini setara dengan 1.267 hektar per hari atau 74 lapangan bola per jam. Dampak ini akan mengakibatkan krisis ekologi global atau ekosida di wilayah Indonesia. Harusnya ini bisa menjadi warning akan daruratnya kondisi hutan di Indonesia,”

Dr. H. Mardani Ali Sera M.Eng

Ketua Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Hidup DPP PKS



Badan Bidang

Sanksi Vaksin Mencabut Bansos, PKS: Makin Menyengsarakan Rakyat

"Bansos adalah upaya pemerintah dalam menanggulangi tingginya angka pengangguran dan kemiskinan yang diproyeksikan tahun 2021 bisa double digit. Jadi tidak ada hubungannya sanksi menahan Bansos dengan penolakan masyarakat terhadap vaksin,"

Akbar Zulfakar

Ketua Departemen Advokasi dan Pelayanan Sosial DPP PKS



Jakarta -- Pemerintah mengeluarkan Perpres No 14 Tahun 2021. Salah satu isinya adalah adanya sanksi penghentian bantuan sosial (Bansos) bagi masyarakat yang

menolak vaksinasi.

Ketua Departemen Advokasi dan Pelayanan Sosial DPP PKS Akbar Zulfakar menegaskan, menahan bantuan sosial

sebuah sanksi adalah tindakan menyengsarakan rakyat.

Akbar menegaskan, bansos bukanlah bentuk hadiah, bonus atau kebaikan hati

pemerintah kepada rakyatnya tapi sebuah kewajiban pemerintah kepada rakyatnya. Bantuan sosial adalah hal warga negara yang sudah diatur dalam UU no 11 Tahun 2009

"Sebab dana bantuan itu juga bersumber dari rakyat. Bansos adalah upaya pemerintah dalam menanggulangi tingginya angka pengangguran dan kemiskinan yang diproyeksikan tahun 2021 bisa double digit. Jadi tidak ada hubungannya sanksi menahan Bansos dengan penolakan masyarakat terhadap vaksin," papar Akbar dalam keterangannya, Jumat (19/2/2021).

Akbar menyebutkan, melakukan manipulasi data penerima bansos atau melakukan korupsi dana bansos seperti yang terjadi di Kemensos beberapa waktu lalu jelas merugikan rakyat. "Apalagi sekarang ditambah menahan dana bansos sebagai bagian dari sanksi, jelas semakin menyengsarakan rakyat," tegasnya.

Akbar menyebut, adanya penolakan sebagian masyarakat terhadap vaksin adalah gambaran adanya

ketidakpercayaan sipil kepada pemerintah. Bagi Akbar, saat ini yang lebih prioritas adalah mengembalikan kepercayaan publik bukan dengan menggelontorkan sanksi, terlebih menyangkut nyawa.

"Pendekatan sanksi saya yakin tidak akan efektif mensukseskan program vaksinasi. Harusnya pemerintah lebih kepada pendekatan persuasif. Pemerintah lebih mengayomi sebagai pelayan publik atau sebagai orang tua kepada anaknya, dengan sosialisasi melibatkan kelompok-kelompok masyarakat dan tokoh masyarakat dan untuk meyakinkan masyarakat terhadap vaksin, daripada mengancam seperti penguasa menak-nakuti rakyatnya," bebernya.

Ia menegaskan, sosok pemimpin yang baik akan lebih dituruti rakyatnya dengan alasan dipercaya. "Pemimpin yang baik dituruti rakyatnya karena kepercayaannya bukan karena ancamannya, apalagi di era demokrasi seperti sekarang," ungkap Akbar.

Badan Bidang

PKS: Indeks Pangan Kalah Sama Ethiopia, Malu Sama Petani



"Data ini mengejutkan dan menunjukkan bahwa pembangunan sektor pertanian dan pangan belum berhasil, padahal di era pandemi ini petani memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi nasional. Malu kita sama petani. Apa ini artinya Indonesia tidak mampu menyediakan pangan yang aman bagi rakyatnya?"

Riyono, S.Kel

Ketua DPP PKS Bidang Tani dan Nelayan

Jakarta - Kabar buruk terdengar dari sektor pangan nasional. Indeks pangan nasional negara

kalah dengan negara miskin dan jauh dari kata berkembang, Ethiopia.

Menurut FSI (Food Sustainability Index) Indonesia berada di urutan 60 dari 67

negara dalam hal keberlanjutan pangan.

"Data ini mengejutkan dan menunjukkan bahwa pembangunan sektor pertanian dan pangan belum berhasil, padahal di era pandemi ini petani memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi nasional. Malu kita sama petani," kata Ketua DPP PKS Bidang Tani dan Nelayan Riyono dalam keterangannya, Sabtu (20/2/2021).

FSI mengacu tiga indikator indikator utama. Dua indikator adalah limbah pangan dan pertanian yang berkelanjutan alias tidak merusak lingkungan dan menjaga ekonomi-sosial sekitarnya. Indikator ketiga atau terakhir adalah persoalan nutrisi seperti obesitas.

Pada lain data FSI menyebutkan bahwa kemampuan Indonesia menjaga indeks keamanan pangan juga rendah dengan skor 62 terendah di bawah

Ghana 57.

"Apa ini artinya Indonesia tidak mampu menyediakan pangan yang aman bagi rakyatnya?" Masak iya kalah sama Ghana? Ini intropeksi bagi jajaran Kabinet," tambah Riyono

Pangan menjadi masalah besar secara global, bahkan target MDGs menghilangkan 1 Miliar orang yang kelaparan gagal dipenuhi tahun 2015 kemarin, bahkan dengan adanya pandemi ini tingkat ketersediaan pangan dunia juga memburuk.

Indeks kelaparan Global Indonesia memiliki skor 19.1 sama dengan Kamerun dan Gambia. Ini harus menjadi peringatan serius bagi ketersediaan pangan di rakyat kecil dan pinggiran pedesaan.

"Pangan adalah 50 persen persen masalah bangsa kita, jika kita berhasil sediakan pangan maka berhasil kita menyelesaikan masalah rakyat kecil kita," terang Riyono.

Badan Bidang

PKS: Australia tidak Ingin Indonesia Swasembada Sapi

“Sudah jelas rasanya kebijakan soal daging sapi ini bagi kita semua, Australia tak mau Indonesia bisa mandiri dan swasembada daging sapi. Ini harus kita jawab dan buktikan. Ada empat akar permasalahan harga daging sapi. Pertama ketersediaan produksi dalam negeri yang masih belum terpenuhi. Kedua, bibit sapi unggul yang masih kekurangan. Ketiga, ketergantungan pada impor yang sangat tinggi. Keempat, ketidakmampuan mengendalikan harga sapi impor. maka perlu ada keberanian pemerintah untuk mengurangi impor dengan kerja keras menyediakan sapi potong agar kebutuhan daging terpenuhi,”

Riyono, S.Kel

Ketua Bidang Tani dan Nelayan DPP PKS

Badan Bidang

Syahrul Aidi: Pemda Harus Manfaatkan BMKG dan Basarnas untuk Kepentingan Daerah



Pekanbaru – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan SAR Nasional (Basarnas) dinilai memiliki peran strategis dalam pembangunan Provinsi Riau ke depannya. Dimana selama ini BMKG dan Basarnas banyak fungsinya yang tidak dimaksimalkan oleh perangkat daerah.

Besarnya peran strategis BMKG dan Basarnas ini disampaikan oleh anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Syahrul Aidi Maazat Lc MA saat melihat kunjungan kerja di kedua insitusi tersebut

pada Senin (22/2/2021). “Selama ini kita hanya menggunakan dua institusi ini untuk hal-hal biasa. Contoh, BMKG hanya untuk melihat kondisi cuaca baik pencegahan kebakaran dan acuan dunia penerbangan. Sementara untuk Basarnas baru dimaksimalkan ketika terjadi bencana alam saja. Padahal keduanya punya peran yang besar jika kita mampu memaksimalkan” kata Syahrul Aidi disela-sela pertemuan tersebut.

Dia mencontohkan hasil

perkembangan cuaca dan iklim dari BMKG dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan produktifitas pertanian. Bukan saja terkait masuk masa tanam saja, namun juga faktor lainnya.

BMKG memiliki sejumlah pakar dan peneliti yang mengamati berbagai hal terkait fenomena alam. Data yang dihimpun BMKG dimanfaatkan secara luas untuk berbagai kepentingan. Selain itu, terdapat juga data BMKG yang bisa digunakan untuk kebijakan dalam sektor sumber daya air, energi dan pertambangan, industri, kelautan dan perikanan serta penanggulangan kebencanaan.

“Maka dari itu, saya mengajak kepada semua kepala daerah di Riau, mari kita ajak BMKG dan Basarnas untuk merumuskan pembangunan daerah. Kabar yang saya dapatkan, bahkan saat ini BMKG sudah mengembangkan aplikasi berbasis artificial intelegencia (kecerdasan buatan-red) dalam

menghadapi era industri 4.0.” tambahnya.

Kepala BMKG Pekanbaru Ramlan dalam sambutannya menyampaikan bahwa BMKG selama ini selalu menampilkan perkembangan cuaca dan iklim setiap 3 jam setiap harinya. BMKG memiliki 120 petugas lapangan dan 213 alat yang tersebar di Provinsi Riau. Dia menyebut

“Memang selama ini hasil laporan cuaca dan iklim dipakai juga oleh petani kita untuk menentukan musim tanam. Namun hanya sebatas itu” kata Ramlan.

Sementara itu Kepala Basarnas Riau Ishak menyampaikan bahwa Basarnas selama ini telah menjalankan fungsinya sebagai badan yang mengelola bencana alam. Garis pantai dan sungai di Riau yang tergolong membuat Basarnas kesulitan untuk menjaga fungsinya karena terhambat oleh fasilitas dan jangkauan.

“Ada beberapa titik Kantor SAR

kita di beberapa kabupaten/kota yang masih menumpang atau menyewa. Sebenarnya kita berharap peran aktif pemerintahan daerah agar mau mengakomodir kepentingan kita. Kita berharap bapak mau mengomunikasikan hal itu” kata Ishak.

Dia mencontohkan ada beberapa posisi strategis kantor SAR yang prioritas seperti di Dumai, Bengkalis dan Tembilahan. Tiga titik itu menurutnya harus terus dijaga karena potensi dan rawan terjadinya bencana dan kecelakaan di perairan. Dia berharap pemkab di 3 titik tersebut ikut memperhatikan.

Menanggapi masukan BMKG dan Basarnas tersebut, Syahrul Aidi meminta kepada kedua institusi tersebut untuk membuat Daftar Inventarisir Masalah (DIM) masing-masing yang akan dijadikan bahan dalam rapat koordinasi Komisi V dengan BMKG dan Basarnas pusat.

Badan Bidang

PKS: Penyelenggaraan PJJ di Masa Pandemi sebagai Solusi Sementara, Bukan Permanen!

"Pemberlakuan PJJ sejatinya perlu dipahami sebagai solusi sementara, bukan solusi permanen. Agar anak-anak semuanya bisa melaksanakan pembelajaran secara langsung kembali,"

Indra Kusuma

Ketua Departemen Pendidikan DPP PKS

Jakarta -- Ketua Departemen Pendidikan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Indra Kusuma menanggapi isu terkait siswa yang rentan dengan sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) selama masa pandemi Covid-19 berlangsung.

Indra menekankan solusi belajar dengan sistem PJJ hanyalah solusi sementara bukan solusi permanen.

"Pemberlakuan PJJ sejatinya perlu dipahami sebagai solusi sementara, bukan solusi permanen," ucap Indra, Selasa (23/02/2021).

Solusi yang lebih komprehensif, lanjut Indra, justru upaya untuk mengakhiri PJJ ini dengan aman.

"Agar anak-anak semuanya bisa melaksanakan pembelajaran



secara langsung kembali," kata Indra.

Dia memaparkan diantara alternatif yang dapat diupayakan serius adalah dengan menyediakan vaksin gratis khusus anak-anak.

"Sampai saat ini vaksinasi untuk orang dewasa karena uji

klinisnya pun pada orang dewasa. Efikasi vaksin yang dihasilkan pun cocoknya untuk orang dewasa, bukan anak-anak," jelas Indra.

Oleh karena itu, Indra meminta agar lembaga terkait seperti Kemdikbud melalui Biofarma dapat menyediakan vaksin merah putih untuk anak-anak.

"Perlu secara khusus menyiapkan vaksin merah putih dengan efikasi memadai untuk anak-anak, sehingga anak-anak bisa segera kembali melangsungkan proses pembelajaran secara langsung," pesan Indra.

Badan Bidang

Kerumunan Jokowi di Maumere, PKS: Apa Artinya Segala Upaya Penanggulangan Covid-19?

“Kalau Presiden dan aparat negara terkait saja tidak bisa mencontohkan dan menjaga berjalannya protokol kesehatan dengan baik, maka apa artinya segala upaya penanganan yang menghamburkan dana masyarakat serta memakan banyak korban jiwa? Apakah harus seperti itu spontanitas seorang Presiden dari sebuah negara dengan tingkat positivity rate Covid-19 yang sangat tinggi? Padahal standar WHO idealnya positivity rate berada di bawah lima persen. Yang dilakukan Presiden malah sengaja berhenti dan membagikan souvenir sehingga membuat kerumunan, lalu berdalih masalah itu selesai dengan alasan spontanitas,”

Ahmad Fathul Bari

Wasekjen Komunikasi Publik DPP PKS

Badan Bidang

PKS: Tiga Cacat dalam Kerumunan Kunjungan Kerja Presiden Jokowi di NTT

“**Cacat keteladanan** ditunjukkan Presiden Jokowi yang melanggar ucapannya sendiri bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. **Cacat perencanaan** dalam kunjungan Presiden Jokowi di NTT menunjukkan kegagalan dalam mengantisipasi potensi kerumumunan yang dapat menyebarkan Covid-19. **Cacat penegakan hukum**, sampai saat ini publik belum melihat ada pihak yang diproses hukum pasca kejadian itu. Padahal nampak kasat mata pelanggaran. Di sisi lain aksi unjuk rasa yang mengkritik kebijakan Presiden Jokowi dibubarkan paksa aparat. Seharusnya semua di mata hukum kedudukannya sama. Jangan sampai negara ini standar ganda, hanya menindak mereka yang berseberangan dengan kekuasaan saja,”

Pipin Sopian

Kepala Staf Presiden (KSP) PKS



Nantikan terus E-Magazine KABARPKS

Kabarkan Kiprah PKS untuk Indonesia



E-MAGAZINE

KABARPKS

Kabarkan Kiprah PKS untuk Indonesia

KABARPKS | Diterbitkan oleh Bidang Humas dan PPID DPP PKS

Penanggung Jawab: Ahmad Mabruki (Ketua DPP PKS Bidang Humas)

Pemimpin Redaksi: Hafidz Muftisany | Redaktur Pelaksana: Erwyn Kurniawan

Redaksi: Solich Mubarak, Hanifah Ihram | Fotografer: Muhammad Hilal, Donny, Juliyanto, Daru, Alris (PKS Foto)

Desain & Layout: Arie Poernama, Toni Suharyanto, Azam Muhammad (PKS Art)

Alamat Redaksi: MD Building | Jalan TB.Simatupang No.82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia.

Phone +62 21 7884 2116, Fax +62 21 7884 6456, E-Mail humas@pks.id



Download e-Newsletter
KABARPKS di pks.id